

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting di suatu bangsa karena pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas pendidikan di Indonesia mengalami pengembangan yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan karakter, evaluasi dan kualitas keterampilan lulusan (Yaqin, 2019: 125).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 membahas mengenai evaluasi pendidikan menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu evaluasi pendidikan dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, transparan, menyeluruh dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Keberhasilan dalam evaluasi harus dengan tepat agar keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan jelas. Maka dari itu dalam melaksanakan evaluasi sebaiknya berlandaskan prinsip, sehingga setiap evaluasi yang diselenggarakan oleh lembaga dapat mencapai pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya (Mustari & Rahman, 2022: 14).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, B.A., M.B.A meresmikan kebijakan terbaru yaitu kurikulum merdeka belajar, tujuan utamanya untuk mengembangkan potensi siswa, guru, dan sekolah serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" terdiri dari empat program utama, yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) empat program tersebut terdiri dari Peraturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Ujian Sekolah Standar Nasional (USBN) di hilangkan dan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (Literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (Numerasi).

Ujian Nasional diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dikarenakan terdapat permasalahan yang dihadapi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu mengenai rendahnya literasi peserta didik di Indonesia yang diketahui dari hasil tes Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yaitu mengenai kesulitan peserta didik dalam berpikir kritis serta bernalar juga diketahui dari minimnya peserta didik yang dapat menyelesaikan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang terdapat didalam soal Ujian Nasional. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan untuk melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk semua sekolah, yang berfokus terhadap kompetensi literasi membaca dan numerasi, di karenakan kedua kompetensi tersebut yang harus dimiliki oleh siswa. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari kurikulum merdeka belajar. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) berfungsi sebagai penilaian dan pemetaan mutu sistem pendidikan (Rohim et al., 2021: 230).

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah tes kognitif yang mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Asesmen kompetensi minimum dimaksudkan untuk mengukur kompetensi siswa

secara mendalam. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tidak hanya mengukur hasil belajar siswa secara kognitif namun pada pelaksanaannya mengukur hasil belajar secara sosial emosional siswa. Dimana, penilaian sosial emosional pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) meliputi sikap, keyakinan, nilai serta perilaku siswa di dalam kinerja yang relevan. Dalam penyajiannya, ada beberapa konten soal mengenai permasalahan dari berbagai konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa menggunakan literasi baca dan numerasi yang dimiliki. Literasi baca didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merealisasikan berbagai jenis teks tertulis. Dapat merujuk pada teks informasi atau fiksi. Sedangkan untuk memahami dan menggunakan prosedur serta fakta matematika untuk memecahkan masalah dikenal dengan numerasi. Kemampuan numerasi di sini mencakup keterampilan merealisasikan konsep dan kaidah matematika ke dalam situasi nyata sehari-hari atau kontekstual (Baharuddin et al 2021: 8).

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan bekerja sama dengan organisasi pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri yaitu *Organisation, for Economic Co-operation and Development* (OECD) bertujuan agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional tetapi dengan mengutamakan kearifan lokal untuk menciptakan kompetensi yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kualitas pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bangsa, karena melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensinya dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Usaha dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia terus diupayakan melalui pembenahan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan peningkatan karakter, serta membangun kebiasaan siswa dalam memahami literasi numerasi.

Perubahan kebijakan sistem pendidikan adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya

manusia pada suatu bangsa. Kurikulum dengan segala perubahannya tidak dapat terlepas dari dunia pendidikan karena pendidikan yang baik akan menciptakan karakter, pola pikir dan sikap yang baik bagi siswa. Apabila mutu lulusan baik maka dapat dipastikan mutu kegiatan belajar mengajar, kompetensi pendidik, input siswa, sarana prasarana, dapat membari arah yang baik untuk tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas.

Dengan adanya Asesmen Kompetensi Minimum, seluruh bidang mata pelajaran mendapatkan peran yang sama karena soal Asesmen Kompetensi Minimum berupa soal literasi dan numerasi serta analisis yang mencakup bidang keilmuan dari berbagai topik. Sehingga diharapkan poses penilaian tersebut dapat lebih holistik dan menyeluruh. Asesmen Kompetensi Minimum bertujuan untuk mengukur kualitas pembelajaran serta pemetaan iklim pembelajaran pada tiap satuan pendidikan di Indonesia, sehingga Asesmen Kompetensi Minimum termasuk ke dalam jenis asesmen formatif karena pelaksanaannya dilakukan pada kelas tengah tidak pada kelas akhir. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum untuk mengukur aspek kompetensi siswa untuk menciptakan individu yang memiliki *softskill* sesuai tuntutan zaman dan menciptakan individu berkarakter kebangsaan. Asesmen Kompetensi Minimum termasuk jenis tes *lowstik* artinya bahwa Asesmen Kompetensi Minimum tidak menjadi penentu kelulusan siswa karena hasil Asesmen Kompetensi Minimum tersebut mengukur mutu serta proses pembelajaran di sekolah. Asesmen Kompetensi Minimum menggunakan metode berupa tes *Computerized Adaptive Testing* (CAT) dan juga dengan *Multistage Testing* (MSAT) artinya soal tersebut diberikan secara adaptif yaitu menyesuaikan kemampuan dan pengetahuan siswa yaitu mencakup aspek memahami, mengingat, dan terdapat unsur analisis, evaluatif serta pemecahan masalah. Jenis soal Asesmen Kompetensi Minimum yaitu menjodohkan, isian singkat, dan uraian panjang, dengan adanya Asesmen Kompetensi Minimum menjadi salah satu perubahan asesmen dalam sistem pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Perdana & Suswandari, 2021: 24).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu dilakukan penelitian karena Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah program baru yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai salah satu evaluasi pendidikan serta dapat melihat mutu sekolah yang akan berdampak terhadap persiapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di tahun berikutnya dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MIS ISLAMIYAH KENDAL KABUPATEN CIREBON”**.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon dilaksanakan di kelas 5. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Nasional diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dikarenakan terdapat permasalahan yaitu rendahnya literasi dan numerasi siswa di Indonesia yang diketahui dari hasil tes Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yaitu mengenai kesulitan peserta didik dalam berpikir kritis serta bernalar juga diketahui dari minimnya peserta didik yang dapat menyelesaikan soal *higher order thinking skills* (HOTS) yang terdapat didalam soal Ujian Nasional.
2. Guru belum memahami adanya pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon, sehingga berdampak pada proses pembelajaran.
3. Progres siswa setelah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dirasa belum optimal.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembicaraan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, dan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka luas pembicaraan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan di MIS Islamiyah Kendal yang terletak di Jalan Raya Kendal Dusun I Blok Pon RT. 001 RW Desa Kendal Kecamatan Astanajapura, Kode Pos 45181. Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang dirancang untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa dan juga berfokus pada standar kelulusan pada tingkat SD/MI digunakan untuk melihat ketercapaian hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Penelitian ini berfokus pada kompetensi pedagogik untuk memahami pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi siswa khususnya literasi dan numerasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
4. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum, sebanyak 30 siswa yang mengikuti pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini berfokus pada dua orang siswa sebagai subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja kendala dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah yang terjadi dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana hasil peningkatan kualitas pendidikan di MIS Islamiyah Kendal jika dilihat dari Standar Kelulusan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah Kendal.
3. Untuk mendeskripsikan hasil peningkatan kualitas pendidikan di MIS Islamiyah Kendal jika dilihat dari Standar Kelulusan.

F. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tentunya membawa hal yang berguna untuk kedepannya serta dengan hasil penelitian tersebut diharapkan membawa banyak manfaat, yaitu bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, bagi kepentingan (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dalam bidang pengkajian pendidikan di tingkat dasar khususnya SD/MI.
 - b. Menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pemetaan mutu pendidikan di Indonesia dan perbaikan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional di tahun berikutnya serta Mendorong guru dan siswa dalam menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi guru, dapat menerapkan pembelajaran yang berorientasi terhadap Asesmen Kompetensi Minimum yaitu kompetensi literasi dan numerasi.
 - b. Bagi siswa, dapat menghadapi kesiapan peserta didik dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di MIS Islamiyah Kendal.
 - c. Bagi sekolah, memberikan masukan dan kontribusi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
 - d. Bagi peneliti, dapat dijadikan temuan awal untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Minimum Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon”.

- e. Bagi peneliti lain, penelitian ini berguna sebagai salah satu masukan dan bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitiannya berkenaan dengan “Analisis Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MIS Islamiyah Kendal Kabupaten Cirebon.

